

ANALISIS KEPEMILIKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN: EVALUASI OUTCOME PENDIDIKAN MENENGAH DI JAWA

Wahyu Purhantara

STIE Mitra Indonesia Yogyakarta, Indonesia

yupur66@gmail.com

Abstract: Analisis Kepemilikan Jiwa Kewirausahaan: Evaluasi Outcome Pendidikan Menengah di Jawa. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan jiwa kewirausahaan. Karena Indonesia memiliki kurang dari 2% dari penduduknya sebagai pengusaha, pendidikan kewirausahaan menjadi hal yang penting. Menurut Drucker, sebuah negara akan makmur jika penduduknya memiliki jiwa kewirausahaan. Pertanyaannya adalah, mengapa semangat kewirausahaan memainkan peran penting dalam pengembangan organisasi, bisnis, dan pengembangan diri? Jawabannya adalah bahwa kewirausahaan melatih orang untuk menjadi mandiri, kreatif, inovatif, kompetitif, berorientasi hasil, menyukai tantangan, bekerja keras, dan sebagainya. Hasil evaluasi terhadap jiwa kewirausahaan berdasarkan hasil proses pendidikan tingkat SMA/SMK di 5 kota di Jawa pada tahun 2011 menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki jiwa kewirausahaan seperti yang diharapkan oleh standar kompetensi bagi lulusan SMA / SMK.

Kata kunci: Jiwa Kewirausahaan, Pendidikan Kewirausahaan

Abstract: Entrepreneurial Spirit Analysis: Outcome Evaluation of Secondary Education in Java. Education has central role in forming character and entrepreneurial spirit. Since Indonesia has less than 2% of its inhabitants as entrepreneurs, education of entrepreneurship becomes urgent. According to Drucker, a country would be prosperous if its inhabitants have entrepreneurial spirit. The question is, why entrepreneurial spirit plays an important role in organization development, business, and self development? The answer is that entrepreneurship trains people to become self-supporting, creative, innovative, competitive, result oriented, fond of challenges, hard working, and so on. Result of evaluation on entrepreneurial spirit of high school education outcome in 5 towns in Java in 2011 indicates that they do not have entrepreneurship spirit as expected by the standard of competence for SMA/ SMK graduates.

Keywords: Entrepreneurial Spirit, Entrepreneurship Education

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam upaya membentuk suatu karakter dan masa depan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan jiwa luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, ka-

rena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know, dan how to do, tetapi mereka juga dituntut untuk melakukan how to be. Persoalannya sekarang adalah untuk mewujudkan how to do masih tertatih-tatih, apalagi untuk mengerjakan how to be. Untuk upaya ini diperlukan adanya transfer budaya dan karakter. Jika hal ini dikaitkan dengan pendidikan kewirausahaan, maka akan

terasa sekali bahwa pendidikan kita ternyata masih jauh dari idealisme iklim kewirausahaan. Hal ini dikarenakan kondisi budaya dan karakter orang Indonesia belum memiliki entrepreneurial minded.

Saat ini pendidikan kewirausahaan di sekolah di semua jenjang pendidikan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Sebab kemampuan wirausaha membuat seseorang bisa mandiri bahkan bisa menciptakan lapangan kerja. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh (*holistik*), sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman dan ketrampilan sebagai wirausaha. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor), peserta didik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan. Pendidikan kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan kewirausahaan dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diinternalisasikan melalui berbagai aspek (Pinayani, 2006).

Upaya untuk memasukkan aspek kewirausahaan di sekolah telah lama diusahakan. Banyak sekolah yang telah memasukkan aspek kewirausahaan di sekolah sebagai acara puncak dari sebuah tema pembelajaran (Brennan, Kogan & Teichler, 1996). Banyak acara bazar atau pasar murah yang berlangsung di sekolah. Sayangnya yang jadi

pelakunya adalah orang tua siswa. Sementara siswa hanya duduk menonton dan berbelanja, tanpa menjadi pelaku aktif. Padahal saat itu adalah saat yang tepat untuk membuat siswa mempunyai keterampilan menciptakan produk yang handal, memiliki daya saing tinggi, kemampuan menjual dan memasarkan produk, mengelola organisasi yang berorientasi pasar, dan lain-lain (Pinayani, 2006).

Kualitas pendidikan di Indonesia pada umumnya diakui oleh banyak kalangan memang belum dapat disejajarkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain termasuk ASEAN. Seperti diungkap Syafiq & Fikawati "... kondisi yang terjadi saat ini adalah banyaknya keluhan dari dunia usaha dan industri (DU-DI) tentang kompetensi yang dimiliki tenaga kerja kita belum memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya bila ada permintaan tenaga kerja (perawat) yang cukup banyak jumlahnya dari luar negeri, dalam penyaringan hanya 4% yang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan belum adanya standar kompetensi untuk setiap kualifikasi tenaga kerja" (22 Februari 2007).

Pada hal AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang dimulai sejak 1 Januari 2003 dan AFLA (*Asean Free Labour Area*) telah dimulai pula, ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) telah dimulai sejak awal tahun 2010, akan sangat memprihatinkan nasib outcome pendidikan menengah di Indonesia. Fenomena ini memberikan arti bahwa persaingan tenaga kerja atau SDM menjadi terbuka. Konsekuensinya, tenaga kerja (SDM) kita harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga kerja (SDM) asing dari berbagai negara. Jika tidak, maka tenaga kerja (SDM) Indonesia akan tersisih oleh tenaga kerja asing (SDM) dari

negeri jiran Malaysia, Philipina, Bangladesh, India, dan sebagainya, sehingga menjadi “pe-nonton” di negeri sendiri. Pada hal selama ini tenaga kerja (SDM) Indonesia belum mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Bersama dengan itu, era kompetisi yang cenderung individualistik kini sudah bergeser ke era komunalitas, yang memerlukan kesadaran untuk saling mengerti dan saling membantu. Ini berarti bahwa bidang pendidikan perlu secara aktif berperan mempersiapkan calon tenaga kerja (SDM) agar mampu bersaing dengan rekan mereka dari negara lain. Oleh karena itu, pendidikan kini juga harus memperhatikan perkembangan tersebut.

Di banyak negara-negara maju, baik itu di Eropa, Amerika Serikat, ataupun di Asia, untuk mencapai tingkat kemakmurannya mereka membutuhkan sekitar 7 – 11% dari penduduknya menjadi wirausaha. Sedangkan di Indonesia, hanya 0,18% dari masyarakatnya memiliki ‘*entrepreneurs*’ (Ciputra, 2009). Ini berarti bahwa kondisi penduduk Indonesia masih jauh dari idealisme penciptaan kemakmuran. Pola pendidikan di Indonesia belum berbasiskan pengajaran dan pendidikan *entrepreneurial spirit*. Oleh karenanya, perlu dipikirkan bagaimana upaya pemerintah untuk menciptakan orang-orang yang mampu berpikir seperti wirausaha, sehingga orientasi pendidikan tidak lagi pada *job oriented*, tetapi menciptakan orang-orang yang berwatak wirausaha, memiliki kepedulian kepada lingkungan sekitar, dan mampu menangkap peluang untuk mandiri. Bila kemajuan ekonomi dan pendidikan di Indonesia serta tingkat demokrasi, kebebasan politik dan ekonomi (*democracy, political and economic freedom*) seperti ini terus berlangsung dengan tingkat perubahan

dengan kemajuan ‘hanya’ seperti ini, maka untuk mencapai kepemilikan wirausaha (*entrepreneurs*) Indonesia sebesar 2% diperlukan waktu yang sangat lama, sekitar 50 sampai 100 tahun (Frances, 2010).

Pendidikan kita selama ini cenderung berjalan dengan verbalistik dan berorientasi semata-mata kepada penguasaan mata pelajaran (Satori, & Saud, 2003). Pengamatan terhadap praktek pendidikan sehari-hari menunjukkan bahwa pendidikan difokuskan agar siswa menguasai informasi yang terkandung dalam materi pelajaran dan kemudian dievaluasi dari seberapa jauh penguasaan itu dicapai oleh siswa. Seakan-akan pendidikan bertujuan untuk menguasai matapelajaran. Bagaimana keterkaitan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari dan bagaimana materi tersebut dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan, kurang mendapat perhatian. Pendidikan seakan terlepas dari kehidupan keseharian, seakan-akan pendidikan untuk pendidikan atau pendidikan tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu siswa tidak mengetahui manfaat apa yang dipelajari dan sampai lulus seringkali tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi.

Menyadari hal di atas, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar kualitas pendidikan dapat meningkat. Akhir-akhir ini, kebijakan dalam dunia pendidikan yang gencar untuk digalakkan adalah program pendidikan berorientasi kecakapan hidup (*life skill*) dan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) (Satori & Udin, 2003). Bekal *life skill* dan kompetensi ini yang nantinya dapat

dijadikan modal dasar bagi para lulusan pendidikan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.

Proses pendidikan akan menghasilkan outcome sebagai suatu akibat dari sebuah output. McNamara, (2002) mengartikan outcome:

“These are actual impact/ benefits/ changes for participants during or after program. These change, or outcome, are usually expressed in term of: knowledge and skills (these are often considered to be rather short term outcome), behavior (these are often considered to be rather intermediate-term outcome), value, condition and status (these are often considered to rather long-term outcome)”.

Dengan demikian, outcome adalah dampak, keuntungan atau perubahan yang terjadi pada partisipan sebagai hasil dari sebuah program atau proyek, seperti: pengetahuan, ketrampilan, sikap, tingkah laku, status, atau kondisi kehidupan. Jadi outcome merupakan kualitas sebuah produk yang dirasakan oleh pengguna. Dalam institusi pendidikan, produk yang dimaksud adalah lulusan lembaga pendidikan yang juga merupakan partisipan, sedangkan penggunanya adalah masyarakat yang memakai tenaga kerja lulusan lembaga pendidikan (Teichler, 1999)

Dalam sebuah proses pembelajaran, komponen yang turut menentukan keberhasilan sebuah proses adalah adanya evaluasi terhadap lulusan (produk) yang telah dihasilkan dan telah bekerja atau melanjutkan studi. Melalui program evaluasi, orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian program pendidikan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama

yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Menurut Sukmadinata, (2007), evaluasi diartikan sebagai proses menggambarkan dan memberikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan

Evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian atas hasil yang telah dicapai. Dalam hal kaitan dengan outcome pendidikan menengah, kegiatan evaluasi diharapkan untuk mendapatkan masukan dari para pelaku (karyawan) dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, lembaga dan atau instansi pengguna lulusan pendidikan menengah, dan kesan atas kinerja mereka (kepuasan pelanggan). Evaluasi outcome ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan model evaluasi kesenjangan (*discrepancy model*).

Evaluasi model kesenjangan (*discrepancy model*) pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) kompetensi lulusan yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) realita kepemilikan jiwa kewirausahaan dari program pendidikan menengah (dalam penelitian ini hanya SMA dan SMK). Kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam hal ini adalah: 1) kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan kondisi yang benar-benar direalisasikan; dan 2) kesenjangan antara status kemampuan yang dimiliki dengan standar kemampuan yang ditentukan. Atas dasar realitas itu, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana bagaimana kepemilikan jiwa kewirausahaan sebagai *outcome* Pendidikan Menengah yang tersebar di lima kota besar di Jawa?

Kinerja SDM dipengaruhi oleh faktor kemampuan dan motivasi. Kemampuan SDM

terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan *reality* yang meliputi pengetahuan dan keterampilan, sedangkan motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja individu sangat terkait dengan kemampuan SDM. Kemampuan (*ability*) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Seluruh kemampuan seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor: kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, sementara kemampuan intelektual memainkan peran yang lebih besar dalam pekerjaan-pekerjaan rumit yang menuntut persyaratan pemrosesan informasi. Kemampuan fisik yang khusus memiliki makna penting untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kurang menuntut keterampilan dan lebih terbakukan dengan sukses. Pekerjaan-pekerjaan mengajukan tuntutan yang berbeda-beda terhadap orang dan bahkan orang memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu kinerja karyawan ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan.

Kemampuan individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Heidjarchman & Husnan (1997) yang menyatakan bahwa kemampuan merupakan faktor-faktor jabatan yaitu: pendidikan, inisiatif dan pengalaman. Kaitannya dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan kinerja SDM, organisasi dapat menjalankan usaha-usaha untuk

mengembangkan karyawannya. Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh kompetensi individu, dukungan organisasi, dan struktur organisasi.

Salah satu faktor yang menentukan kualitas kinerja SDM adalah kompetensi SDM. Secara umum kompetensi diartikan sebagai hasil integrasi dari pengetahuan dan perilaku yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan. Menurut Simanjuntak (2005), kompetensi SDM adalah kemampuan dan ketrampilan melakukan kerja. Kemampuan setiap orang dipengaruhi oleh kemampuan dan ketrampilan kerja dan motivasi dan etos kerja. Kemampuan dan ketrampilan kerja setiap orang dipengaruhi oleh kebugaran fisik dan kesehatan jiwa individu yang bersangkutan, pendidikan, akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerjanya.

Kompetensi seseorang dapat berkembang atau meningkat melalui beberapa cara, seperti melalui pengalaman, belajar sendiri, pendidikan formal maupun melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) tertentu. Masing-masing pola perkembangan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sebaiknya diperoleh melalui perpaduan dari semua cara tersebut. Dari aspek teoritis dan praktis perkembangan kompetensi yang diperoleh melalui Diklat dapat dikatakan lebih lengkap dan mendalam dari pada melewati pengalaman. Cara-cara inilah yang akan memperkuat kompetensi seseorang, dan hal ini akan mampu meneguhkan kepemilikan jiwa kewirausahaan seseorang.

Kewirausahaan (*entrepreneurship*) muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi

semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2003). Esensi dari kewirausahaan adalah menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmerer (2006), nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui cara-cara sebagai berikut: pengembangan teknologi baru (*developing new technology*), penemuan pengetahuan baru (*discovering new knowledge*), perbaikan produk (barang dan jasa) yang sudah ada (*improving existing products or services*), dan penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit (*finding different ways of providing more goods and services with fewer resources*)."

Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan pada peran pengusaha kecil, namun sebenarnya karakter wirausaha juga dimiliki oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausaha. Karakter kewirausahaan ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan tantangan, apapun profesinya.

Dengan demikian, menurut Frinces (2004), kepemilikan jiwa kewirausahaan, adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Kewirausahaan adalah jiwa yang membentuk karakter dan perilaku seseorang yang selalu kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan

usahanya. Frinces (2004), memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang yang (1) percaya diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) berjiwa kepemimpinan, (5) berorientasi ke depan, dan (6) keorisinalan.

Jadi, jiwa kewirausahaan dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa seseorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*) atau kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada September-Desember 2011 dengan mengambil sampel karyawan, mahasiswa dan wirausaha di lima kota besar di Jawa, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, dengan jumlah sample 504 responden. Pengkajian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Deskripsi lingkungan kerja, perkembangan di pendidikan tinggi dan lingkungan perkembangan kebutuhan ekonomi

regional dapat juga dipandang sebagai pendekatan kasus jamak (*multiple case studies*), namun dapat juga termasuk sebagai pengkajian kebijakan Dirjen Pendidikan Tinggi yang bersifat eksplanatoris. Ketiga sudut pandang itu digunakan dalam garis besarnya dalam pengkajian ini. Sedangkan pisau analisis dikembangkan dengan menggunakan hasil kajian kebijakan, kajian konseptual dan kajian empirik.

Pada DU-DI, perguruan tinggi, dan wirausaha dikumpulkan data melalui kuesioner, observasi serta wawancara. Hasil temuan di lima kota terpilih kemudian diselenggarakan kajian mendalam dan *discusschek* (proses triangulasi) dengan para pengguna lulusan pendidikan menengah. Hasil wawancara dengan pimpinan DU-DI, pimpinan PTN-PTS, dan beberapa wirausahawan kemudian dianalisis dengan menggunakan hasil kajian konseptual dan empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lulus pendidikan menengah (SMA dan SMK) terus mau ke mana adalah sebuah pertanyaan klasik yang menjadi pikiran bagi mereka. Dari data statistik menunjukkan bahwa setiap tahunnya kurang lebih ada 2,2 juta jiwa yang lulus dari SMA dan SMK. Dari angka tersebut, hanya 63% saja yang berhasil melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi, dan sisanya (37%) dapat dipastikan menjadi angkatan kerja (*Harian Ekonomi Neraca*, 6 November 2011). Jika ini dikaitkan dengan hasil pelacakan alumni (SMA dan SMK) September 2011 di lima kota besar di Jawa, menunjukkan bahwa lulusan SMA yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi sebesar 74,74%, dan sisanya lebih memilih

bekerja sambil menunggu kesempatan kuliah. Sedang lulusan SMK yang bekerja pada tahun itu juga sebesar 49%, dan mereka yang memilih melanjutkan studi di pendidikan tinggi sebesar 24%, dan sisanya tidak dapat diketahui.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan target kinerja dari Direktorat Pembinaan SMK, di mana pada tahun 2011 ditargetkan lulusan SMA/SMK/SMLB bekerja pada tahun kelulusan sebesar 52.92% (Renstra Dirjen Dikmen 2010-2014: 66). Simpangan hasil survei dengan target ini dapat dipahami, mengingat: pertama, survei hanya dilakukan di lima kota besar di Jawa, sehingga angka keterwakilan secara nasional belum dianggap cukup. Kedua, beberapa SMA dan SMK yang dijadikan sampel survei tidak semuanya memiliki data yang komprehensif.

Secara rinci hasil survei kepemilikan jiwa kewirausahaan outcome pendidikan menengah di lima kota besar di Jawa dapat dilihat dari tiga karakteristik responden yakni karyawan perusahaan atau pemerintah, mahasiswa, dan wirausahawan.

Jiwa Kewirausahaan Karyawan

Sebagai karyawan perusahaan atau pemerintah ditemukan bahwa jiwa kewirausahaan yang mereka miliki sekarang ini dapat dibilang hanya pas-pasan. Artinya, dalam hal kreativitas dan inovasi kurang dilakukan, karena mereka melakukan atau menunggu orang lain melakukan inovasi (44,90%). Akibatnya, mereka tidak mampu menciptakan perubahan pada dirinya. Ini terbukti mereka menunggu diperintah orang lain untuk merubah diri (44,90%). Pada hal responden karyawan berpendidikan menengah di lima kota besar di Jawa ternyata mem-

iliki keahlian khusus (56,58%) dan menunjang pekerjaannya (81,43%). Dari sejumlah responden menyatakan bahwa keahlian khususnya menentukan dalam kualitas/ kuantitas produk (32,45%).

Kemampuan menerapkan jiwa kewirausahaan yang telah diperoleh mereka di sekolah menengah ternyata kurang mampu diimplementasikan di dunia kerja. Ini berarti bahwa jiwa kewirausahaan belum mampu diinternalisasikan dalam dirinya, atau masih sebatas kewirausahaan sebagai ilmu, belum sebagai jiwa dan semangat. Pada hal jiwa kewirausahaan sangat bermanfaat dalam dunia kerja apapun. Kemauan untuk melakukan kreativitas dan inovasi, mereka masih menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu, sehingga mereka dapat terinspirasi. Atau mereka menunggu diperintah oleh orang lain, baru kemudian mereka melakukan kreativitas dan inovasi. Keadaan ini telah mengakibatkan mereka tidak melakukan perubahan terhadap dirinya.

Kompetensi yang diperoleh dari sekolah menengah sangat menentukan keberhasilan pekerjaan responden (73,60%), dan ini berhubungan dengan posisi jabatan yang diperoleh saat ini (56,00%). Hanya 22,86% yang menyatakan bahwa jabatan pekerjaan tidak berhubungan dengan kompetensi dari pendidikan menengahnya. Keberhasilan menempati jabatan juga ditunjang oleh kompetensi yang diperoleh di sekolah menengah dan pemahaman atas pekerjaannya (68,18%).

Apabila dikaitkan dengan daya inovasi pekerjaan, semua responden mengupayakan untuk melakukan perbaikan hasil pekerjaan dengan mengevaluasi hasil pekerjaannya

(83,78). Sementara untuk memperoleh ide inovasi pekerjaan dengan proses membaca buku, majalah, atau referensi lainnya sangat kecil (2,32%). Ini menunjukkan bahwa tingkat minat membaca buku dari mereka sangat kecil, sehingga sumber kreativitas dan inovasi mereka sangatlah minim. Ilmu pengetahuan bersumber pada buku, jurnal, majalah, dan internet. Jika SDM di DU-DI dan lembaga pemerintah tidak memiliki minat membaca, maka sulit sekali untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Karena dari ilmu pengetahuan yang diperolehnya, mereka akan terinspirasi untuk melakukan inisiatif, kreativitas, dan inovasi terhadap pekerjaannya.

Sikap kompetisi mereka salah satunya ditunjukkan dengan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik daripada orang lain (99,38%). Cara yang ditempuh oleh karyawan dalam berprestasi dan berkompetisi adalah bekerja sesuai dengan standar operasi prosedur (47,26%). Sementara itu responden yang lain melakukan inovasi atas pekerjaannya (35,82%), sedang yang lain menempuh dengan cara bekerja tepat waktu pada setiap pekerjaannya (16,42%), dan hanya 0,5% yang menempuh jalan kotor, yaitu menjatuhkan kinerja orang lain.

Meski demikian mereka pernah mengalami kendala dalam menjalankan pekerjaan (78,6%). Mereka mengatasi masalahnya dengan cara mendiskusikan dengan teman pekerja (44,90%) dan menanyakan kepada yang lebih berpengalaman dalam satu level jabatan (33,67%). Responden lain menempuh cara mengatasi masalah pekerjaannya dengan menanyakan kepada atasannya (17,86%) dan mencari solusi melalui referensi (3,57%) dari buku, majalah,

jurnal dan referensi lainnya. Tentu saja untuk kepentingan itu ditunjang oleh keluwesan dalam bergaul mereka, karena mereka bergaul tanpa memandang jabatan pekerja (92,8%) dan dilakukan setiap saat (72,9%).

Ilmu pengetahuan yang diperoleh di sekolah menengah sangat menunjang pekerjaan responden karyawan DU-DI, lembaga pemerintah (77,42%), demikian pula halnya dengan ketrampilan dan penguasaan teknologi di sekolah juga menunjang pekerjaannya (77,78%).

Posisi jabatan sebagai *first line manager* (ada 97 responden) yang diperoleh saat ini, 85 responden atau 87,63% menyatakan terkait dengan pemahaman terhadap pekerjaannya dan 24,21% menyatakan kurang terkait dengan pemahaman terhadap pekerjaan, tetapi ditentukan oleh faktor komunikasi dan jaringan kerja. Di sisi lain, posisi jabatan yang mereka peroleh sekarang ini (95 responden) didasarkan atas kompetensi yang dimiliki olehnya (57,89%), dan yang lain adalah 28,43% didasarkan atas latar belakang pendidikannya. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, posisi *first line manager* ditempati oleh lulusan SMK (53,61%), dan sisanya (46,39%) ditempati oleh responden dari lulusan SMA.

Data tersebut menunjukkan bahwa level jabatan di DU-DI, dan di lembaga pemerintah ditentukan oleh faktor: pemahaman terhadap pekerjaan, kompetensi SDM yang dimilikinya, latar belakang pendidikan, dan masa kerja responden. Ini berarti bahwa profesionalisme pekerjaan sangat menentukan level pekerjaan, sehingga posisi sebagai *first line manager* yang diperolehnya benar-benar dikarenakan paham terhadap karakter pekerjaannya. Walaupun

selisihnya kecil, ternyata pendidikan SMK lebih memberikan peluang untuk menempati posisi jabatan, minimal *first line manager*, daripada pendidikan SMA. Lebih-lebih di dunia usaha dan dunia industri yang diwarnai oleh ketatnya kompetisi, maka profesionalisme kerja adalah salah satu cara untuk membangun kualitas kerja, kualitas produk, kualitas layanan, kepercayaan pelanggan, dan lain-lain.

Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa

Tingkat pemahaman nilai-nilai kewirausahaan di kalangan mahasiswa ternyata masih kurang. Hanya 60% dari responden yang selalu melakukan kreativitas dan inovasi di dalam menempuh pendidikannya. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan kemampuan khusus sebagai pembeda di antara mereka hanya 59,38%. Sedang responden mahasiswa yang menjawab bahwa mereka memanfaatkan peluang untuk menunjang proses kuliahnya (50,00%), karena hal ini dapat menentukan kualitas tugas dan kuantitas tugas-tugas mata kuliah. Kemampuan daya pembeda di antara mahasiswa juga sangat minim sekali, yaitu 26,32%. Bila dikaitkan dengan prestasi akademik, keadaan itu memiliki korelasi. Sebagian besar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 8,2 semester untuk program sarjana sosial dan 9,4 semester untuk sarjana eksakta, dan 6,1 semester untuk program diploma. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang mereka tempuh pun cukup tinggi, di mana rata-rata mereka mampu mendapatkan IPK 3,32 untuk wanita dan 3,27 bagi pria. IPK mahasiswa dari SMA ternyata lebih baik dari pada mahasiswa dari SMK.

Jiwa Kewirausahaan Wirausahawan

Menjadi wirausaha yang berhasil adalah impian setiap pelaku usaha, dan persyaratan utama yang harus dimilikinya adalah jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki jiwa dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*). Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang (*opportunity*), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko (*risk bearing*) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu sumber daya.

Dari pengertian di atas dan dihubungkan dengan hasil evaluasi, ternyata lulusan pendidikan menengah juga melakukan upaya untuk menjadi wirausaha. Lepas dari persaingannya dengan wirausaha yang berasal dari lulusan pendidikan tinggi, ternyata mereka dapat eksis, *survival* dan *sustainable* dalam menjalankan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para lulusan pendidikan menengah juga memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Dari responden di lima kota yang berhasil disurvei menunjukkan bahwa mereka (73,33%) memulai usaha dari awal. Artinya, mereka memang mem-

iliki niatan untuk berwirausaha dengan bermodalkan kemampuan yang dimilikinya. Kemauan untuk mandiri ini (96,67%) yang ditunjang oleh perolehan kemampuan berwirausaha dari orang tuanya (43,33%) telah menunjukkan keberhasilan usahanya.

Binaan dari orang tuanya ini menunjukkan keberhasilannya dalam membangun usaha yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun (37,84), sebuah prestasi usaha yang luar biasa. Sementara responden yang lain menjawab keberhasilan membangun usaha kurun waktu 2 – 3 tahun (27,03%), sedang yang berhasil berbisnis antara 1 – 2 adalah 20,73%, dan sisanya 5,41% menjawab lebih dari 4 tahun dalam membangun usahanya.

Usaha bisnis yang dibangun oleh wirausaha lulusan pendidikan menengah diawali dengan usaha kerjasama (60,00%), yaitu dengan orang tuanya dan ditunjang oleh kesesuaian usaha dengan kompetensi yang dimiliki olehnya (50,00%) dan pendidikan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah (40,00%).

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa: 1) para wirausaha yang berlatar belakang pendidikan menengah diperoleh dari pendidikan, baik itu di sekolah, dari orang tuanya, ataupun dari lembaga pemerintah. 2) Mereka berwirausaha mulai dari awal, sehingga mereka tahu benar bagaimana berjuang untuk mandiri, bagaimana menangani proses operasi usaha, bagaimana mengelola risiko usaha, sehingga mereka berhasil membangun usaha dalam waktu yang relatif singkat (kurang dari satu tahun). Waktu yang seperti ini adalah waktu yang relatif sangat baik di dalam mem-

bangun usaha. Ini berarti bahwa mereka memang memiliki kapabilitas untuk membangun usaha sendiri.

Jatuh bangun dalam berwirausaha adalah sebuah dinamika yang harus dialami bagi mereka dalam bergelut di bidang usaha. Dinamika yang demikian itu ditunjukkan oleh mereka dalam proses produksi atau operasi, di mana 66,67% di antara mereka pernah mengalami kendala dalam proses operasi, di mana ditunjukkan mereka mengalami kendala: 23,33% bidang bahan baku, 30% dalam proses produksi, 20% waktu produksi yang tidak tepat waktu, dan sisanya 26,67% mengalami kecacatan produk.

Dari sisi bauran pemasaran (*marketing mix*), mereka lebih memilih tempat usaha yang strategis (51,35%), dan wirausaha yang memilih harga produk sebesar 29,73%. Sedangkan wirausaha yang mempergunakan kualitas produk hanya 10,81%, dan mereka jarang mempergunakan cara promosi (8,11%). Pemilihan tempat usaha mereka ini ditunjukkan oleh tempat usaha mereka yang memang strategis (83,33%), sehingga hal ini menunjang transaksi penjualan ramai (53,33%).

Untuk menunjang kelancaran usaha, para wirausahawan ini melakukan promosi dengan cara iklan di media cetak (56,67%) dan mengikuti pameran atau expo (10,00%). Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemilihan tempat usaha sangat diperhatikan daripada strategi harga, promosi, maupun kualitas produk. Ini dibuktikan dengan transaksi usaha mereka yang tergolong ramai, sehingga wajar jika mereka dapat membangun usahanya kurun waktu 2 – 3 tahun. Hal ini dikarenakan usaha mereka (41,38%) di bidang jasa konstruksi, otomotif, boga, kecantikan, dan busana.

Ketepatan memilih strategi pemasaran bagi usahanya sangat menunjang keberhasilan upayanya untuk mengembalikan modal (*breakeven point, BEP*). Dari responden di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa 83,33% mereka telah berhasil mengembalikan modal, dan 36,67% dari angka itu berhasil mengembalikan modalnya antara 3 – 4 tahun (lihat Grafik 9). Ini suatu periode waktu yang sangat luar biasa, dan ini berarti bahwa 73,33% mereka sekarang ini telah menikmati hasil usahanya, karena usaha mereka telah lebih dari 4 tahun.

Keberhasilan di bidang keuangan ditunjang oleh *cash flow* yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikasinya adalah ketepatan dalam membayar gaji karyawan (90,00%); ketepatan membayar utang untuk modal kerjanya (93,33%); taat membayar pajak (80,00%), dan 80,00% di antaranya membayar pajak dengan tepat waktu.

Dari aspek legalitas usaha, 70,00% di antara mereka telah memiliki ijin usaha (HO), dan 60,00% mereka telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini menunjukkan bahwa mereka telah memikirkan aspek legalitas dan kesadaran hukum terhadap bisnisnya.

Keberhasilan usaha mereka, ternyata dapat membuka peluang kerja untuk orang lain. 37,50% dari responden ternyata memiliki karyawan kurang dari lima orang, 37,50% memiliki 5 – 10 karyawan. Sedangkan wirausaha yang mempekerjakan karyawannya sejumlah 10 – 30 orang sebesar 10,00% dan hanya 15,00% saja yang memiliki karyawan lebih dari 30 orang. Dari karyawan yang mereka berdayakan, 66,67% adalah wanita, dan 60,00% status mereka adalah karyawan

tetap. Gambaran ini menunjukkan bahwa 1) usaha mereka memiliki nilai kemanfaatan bagi orang lain, yaitu memberi kesempatan orang lain untuk turut serta bekerja dan mengembangkan usahanya, bahkan dapat menularkan nilai-nilai kewirausahaan dari pemilik ke pegawainya.

Jika ditinjau dari kelayakan usaha, maka usaha mereka sudah tergolong layak dan dapat dijadikan tumpuan hidup bagi mereka. Pengertian “layak” atau *feasible* dalam penilaian ini adalah usaha mereka telah memberi manfaat, baik manfaat keuangan (*financial benefit*) maupun manfaat sosial (*social benefit*). Manfaat keuangan, usaha harus menghasilkan profit dan bahkan BEP mereka tergolong cepat, karena profit akan bermanfaat bagi pemilik modal, SDM, investor, kreditor, pemerintah. Sedangkan manfaat sosial berupa: manfaat bagi sekitar tempat usaha, pelanggan, dan pemerintah.

Dari sisi kelayakan produksi, bagi mereka yang paling penting adalah produk mereka tergolong baik dan diminati oleh pelanggan. Bukti dari tingkat minat pelanggan yang menyukai produknya adalah tingkat transaksi yang tergolong ramai. Kondisi yang demikian ini sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang tepat dengan penggunaan strategi tempat yang paling utama. Dari sisi manajemen SDM, mereka mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk turut serta bekerja di tempat usahanya. Kunci kelayakan usaha terletak pada bagaimana mengelola keuangan yang tepat agar usahanya tetap menghasilkan laba. Aliran kas mereka tergolong lancar, ini dapat ditengarai melalui pendapatan yang melebihi dari pengeluaran usahanya. Kelancaran dalam membayar gaji karyawan, kelancaran

membayar hutang modal kerja, ketaatan membayar pajak yang tepat waktu, kurangnya piutang adalah bukti bahwa usaha mereka layak untuk diteruskan.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa usaha mereka memiliki jaminan keselamatan bagi investasi di dalam usahanya. Jaminan keselamatan investasi adalah alat utama untuk mengembangbiakkan dana investasi. Jaminan ini dapat ditunjukkan melalui: prospek keuangan (risiko finansial), prospek pasar dan produk (analisa keunggulan), model manajemen dan organisasi, jaminan hukum, penghitungan risiko bisnis, dll. Jaminan keselamatan ini sangat mempengaruhi investor menanamkan modalnya, karena keselamatan bisnis sangat berkaitan dengan keberlanjutan bisnis. Investor tidak menginginkan kerugian yang diakibatkan oleh salah perhitungan di dalam menempatkan dananya.

Aset yang dipergunakan untuk usaha, sebagian besar dari responden mempergunakan tanah dan gedung (43,33%) dengan status sewa (40,00%), sedang yang milik sendiri ada 26,67%. Demikian pula halnya dengan aset jaringan usaha, mereka yang menggunakan telepon dan faxsimile sebanyak 73,33%, dan hanya 16,67% saja dari mereka yang telah menggunakan fasilitas internet, dimana statusnya milik sendiri (50%), dan 30% mereka menyewa. Alat transportasi yang dipergunakan dan peralatan usaha 80,00% adalah milik sendiri.

Kondisi kepemilikan aset adalah cerminan dari keseriusan seseorang dalam berwirausaha. Maksudnya adalah bagi wirausahawan yang berhasil, aset yang dipergunakan adalah tidak semuanya milik sendiri. Untuk pemilihan tanah dan gedung

usaha, ada beberapa model penghitungan untuk menentukan status sewa atau membeli dan ini terkait dengan jangka waktu bisnis. Bagi bisnis yang memerlukan tempat strategis dan untuk jangka waktu yang panjang, maka status aset sebaiknya adalah membeli. Sedang untuk peralatan, untuk kebutuhan jangka panjang justru lebih baik dengan sistem sewa. Namun sayang, bisnis mereka belum didukung oleh fasilitas jaringan komunikasi dengan internet. Mereka masih mengandalkan komunikasi dengan telepon dan faksimile. Pada hal untuk membangun bisnis masa kini dan masa depan, bisnis harus dapat menguasai informasi (Alvin Toefler), yaitu suatu bisnis yang mampu memanfaatkan jaringan internet untuk usahanya.

Untuk mendukung usaha mereka, sebagian responden sering mengikuti pameran (33,33%) yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, sedang mereka yang mengikuti asosiasi bisnis sejumlah 30,00%. Keikutsertaan pameran ini ternyata lebih didukung atas pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Daerah (40%). Meski demikian, sebagian besar responden (60%) tidak mendapat pembinaan dari lembaga terkait, alias mereka berwirausaha, berkembang, dan menikmati hasilnya tanpa dibina oleh pihak manapun. Hanya 40% responden saja yang mendapat pembinaan dari dinas terkait. Implementasi pembinaan ini berupa bantuan permodalan yang berupa bantuan lunak (16,67%), kursus singkat terkait dengan kewirausahaan (10%), serta pendidikan dan latihan sebesar 3,33%.

Pembinaan dari lembaga pemerintah adalah salah bentuk kepeduliannya kepada keberadaan wirausaha. Permasalahannya, dari responden justru tidak mendapat pembinaan dari dinas terkait. Ini perlu diteliti lebih lanjut, karena hanya 40% dari responden saja yang mendapat binaan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Pada hal pembinaan ini sangat bermanfaat untuk membesar usaha mereka melalui pendidikan dan pelatihan, kursus singkat, pendampingan, sampai pada bantuan modal kerja.

Di bidang modal kerja atas usahanya, responden mensikapinya dengan mempergunakan modal sendiri (40%) dan pinjaman dari orang tuanya sebesar 30%, sementara mereka yang menggunakan fasilitas pinjaman (kredit) dari investor hanya 20%. Lembaga yang memberikan dana talangan usaha, 33,33% berasal dari pemerintah daerah, dan 16,67% berasal dari asosiasi pengusaha (koperasi).

Data di atas menunjukkan bahwa responden wirausaha lebih percaya menggunakan dananya sendiri untuk kebutuhan modal kerjanya dan dukungan fasilitas atau bantuan dari orang tuanya. Ini dapat dianalisa, pertama, mereka kurang berani menghadapi risiko kredit di lembaga investor. Pada hal banyak lembaga pemerintah dan swasta yang menawarkan kredit murahya beserta dengan kemudahannya. Kedua, orang tua yang ingin memberikan binaan dan motivasi berwirausaha kepada anaknya. Kepedulian ini dapat dipahami, mengingat kemampuan wirausaha mereka didapat dari orang tuanya (43,33%). Artinya, orang tuanya memang

memiliki keinginan agar anaknya menjadi wirausaha.

SIMPULAN

Penguasaan nilai-nilai kewirausahaan, di antara karyawan lulusan SMA dan SMK tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Rata-rata mereka kurang memiliki jiwa kewirausahaan atau tidak dapat mengimplementasikannya di pekerjaannya. Kerja keras, berani untuk berisiko dan tidak takut salah, kerja penuh inovasi, berani bersaing, dan lain-lain kurang teraktualisasikan pada pekerjaannya. Mereka lebih banyak bersikap menunggu diperintah, bekerja sesuai standar operasional atau sesuai perintah. Demikian pula halnya mereka yang berstatus sebagai mahasiswa, di mana nilai-nilai *entrepreneurial spirit* sangat kurang dimiliki oleh mereka. Hasil kreativitas dan inovasi mahasiswa sangatlah kurang, baik dalam karya ilmiah, riset ilmiah, produk inovatif, atau kegiatan kemahasiswaan.

Bagi mereka yang lebih memilih menjadi wirausaha, peran orang tua lebih menentukan daripada pendidikan kewirausahaan dari sekolah atau dari manapun. Peran orang tua ini ditunjukkan langkah teknik berwirausaha (pendampingan dilakukan oleh orang tua, dan modal awal usahanya). Peran tersebut dapat dimaklumi, karena mereka masih sering mengalami kendala operasi. Artinya, proses operasi yang memerlukan penanganan secara langsung, konsultasi dengan orang tua dapat dijalankan lebih efektif, yaitu setiap saat dengan orang tuanya.

Hal tersebut bila dihubungkan dengan jumlah wirausaha yang ternyata lulusan SMA

lebih banyak daripada lulusan SMK. Fenomena ini perlu dikaji lebih serius untuk mengetahui latar belakang untuk memilih menjadi wirausaha. Memang untuk kebutuhan ini, akhirnya mereka harus menambah ketrampilan teknis, kursus-kursus, dan melanjutkan studinya di pendidikan tinggi dengan biaya sendiri

Usaha mereka di bidang bisnis belum mampu memanfaatkan sentuhan bisnis yang profesional. Ini dapat dilihat dari bauran pemasaran (*marketing mix*) yang mereka gunakan, di mana mereka masih berprinsip bahwa faktor tempat yang strategis sangat menentukan keberhasilan usaha. Faktor promosi (*promotion*), produk (*product*), dan harga (*price*) belum diterapkan secara optimal. Apalagi menggunakan strategi pemasaran STP (*strategy, targeting, dan positioning*), usaha mereka sama sekali tidak mengenal hal tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut direkomendasikan bahwa pola pendidikan menengah perlu mendapat sentuhan jiwa kewirausahaan dalam berbagai lini, seperti pengintegrasian pendidikan kewirausahaan dalam seluruh mata pelajaran, pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam silabus dan RPP, pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam kegiatan ekstra kurikuler, dan pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri peserta didik.

Perubahan Pelaksanaan Pembelajaran Kewirausahaan dari Teori ke Praktik. Pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada pencapaian tiga kompetensi yang meliputi penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep dan pengembangan skill,

dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman konsep.

Pola pendidikan di sekolah menengah perlu digeser, tidak sekedar berorientasi pada pasar kerja tetapi peserta didik perlu mendapat orientasi kemandirian (*entrepreneurial oriented*). Artinya, output pendidikan menengah tidak hanya berorientasi pada mencari lapangan kerja, tetapi mereka juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk membuka lapangan kerja baru.

Untuk menghasilkan lulusan yang siap pakai, mandiri atau mampu berwirausaha, maka pendidikan di SMA dan SMK perlu melakukan usaha-usaha baik di bidang pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, dengan menyertakan DU-DI dalam kegiatan sekolah. Pihak DUDI menyarankan agar SMA-SMK: a) menambah *life skill* dengan materi yang sesuai dengan potensi lokal; b) menambah guru yang sesuai dengan bidangnya; dan c) perlu meningkatkan kompetensi dan wawasan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang keahlian yang diampunya (Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. 2010).

Sarana dan prasarana perlu dilengkapi untuk semua jurusan, termasuk pengadaan wahana pelatihan berbasis produksi (*teaching factory*) untuk menerapkan kegiatan pengembangan *life skill* dan penanaman jiwa kewirausahaan (*entrepreneurial spirit*). Untuk itu perlu ditentukan kebijakan dari pengelola pendidikan menengah (Dirjen Pendidikan Menengah), sehingga pengembangan kurikulum dan pengajaran tidak hanya berbasis pada kebutuhan saat ini dan

masa lalu, tetapi kebutuhan masa depan perlu dirancang.

Program pendidikan menengah harus dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi lingkungan, karakteristik peserta didik, potensi ekonomi dan teknologi lokal, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini bertujuan agar lulusan pendidikan dapat menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan ekonomi yang berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Brennan, J., Kogan, M. & Teichler, U. (1996) *Higher Education and Work*. London: Jessica Kingsley Publication.
- Ciputra. (2009) "Solusi Job Creation di Tengah Krisis Global," *Harian indopos*, Sabtu 21 Februari 2009.
- Frinces, Z.H. (2004) *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*, Yogyakarta: Mida Pustaka
- Frinces, Z.H. (2010) "Entrepreneurial Leadership: Paradigma Baru Kepemimpinan Global," *Journal of Economic*, 1(2).
- Heidjarchman & Husnan, S. (1997) *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: BPFE.
- McNamara, D. (2002) *Classroom Pedagogy and Primary Practice*, London: Routledge 11 New Letter Lane.
- Pinayani, A. (2006) "Prospek Masa Depan Kewirausahaan di Indonesia," *Jurnal Ekop*, 1(1),
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas. (2010) *Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan*; Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa. Jakarta: Kemdiknas.

- Satori, D. & Udin, S.S. (2003) *Implementasi Program "Life Skills" dan "Broad – Based Education" Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Jurnal Adpen UPI.
- Simanjuntak, P.J. (2005) *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukmadinata, N.S. (2007) *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryana (2003) *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syafiq, A. & Fikawati, S. (2007) "Kompetensi Yang Dibutuhkan Dalam Dunia Kerja," *Makalah Seminar Sehari* di Universitas Indonesia pada tanggal 22 Februari 2007.
- Teichler, U. (1999) "Research On The Relationship Between Higher Education And The World Of Work: Past Achievements, Problems And New Challenges." *Higher Education*, 38: 169-190.
- Zimmerer, TW & Scarborough, NM. (2006) *Essential of Entrepreneurship and Small Management*, New Jersey: Pearson Education.